I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu kelompok yang menjadi bagian dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi menciptakan peranan sosial. Kumpulan dari keluarga akan membentuk suatu lapisan masyarakat dan selanjutnya lapisan-lapisan masyarakat tersebut akan bergabung dalam kelompok besar menjadi suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa tergantung pada pembinaan anggota keluarga dan generasi akan datang.

Dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, salah satu yang berperan dalam membina keluarga adalah ibu. Sebagai seorang wanita, ibu dituntut juga untuk mempunyai waktu yang lebih lama untuk tinggal dirumah dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, maka wanita dituntut untuk dapat mengatur kehidupan rumah tangganya, terutama dalam fungsi sebagai pengasuh anak dan pengatur konsumsi makanan dalam satu keluarga. Dalam membina keluarga ini, wanita memerlukan bekal pendidikan dan pengetahuan.

Perkembangan menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita mempunyai potensi yang sama besarnya dengan potensi pria, karena itu dapat dikerahkan dalam pembangunan. Secara hukum wanita Indonesia berpeluang sama dengan

pria/laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di semua bidang kehidupan. Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membeda-bedakan apakah pria ataupun wanita, dalam bidang-bidang pekerjaan, kesehatan, politik, dan hukum, serta hak perorangan. Wanita, sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, dan kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan.

Menurut Permen Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Bab II menjelaskan bahwa:

> Sebagian besar masyarakat, kedudukan/posisi wanita, juga identitas wanita masih ditentukan oleh identitas perkawinannya. Kewanitaan seorang wanita dinilai berdasarkan pada kemampuannya menikah dan mempertahankan perkawinannya. Di samping itu juga berdasarkan pada kemampuan wanita untuk hamil dan melahirkan (reproduksi biologis), serta tanggungjawabnya untuk melayani suami, mengasuh anak dan mengelola rumahtangga (reproduksi sosial). Hal ini dianggap alamiah/wajar. Lebih dari itu, ketidakmampuan wanita mengartikulasikan/menyuarakan kepentingannya dianggap sebagai hal yang wajar/alamiah, karena wanita dianggap apolitis dan kepentingannya disuarakan pria. Tuntutan akan peran domestiknya membatasi akses wanita berkiprah di ranah publik, dan seolah tidak ada pilihan bagi wanita. Kenyataan budaya inilah yang kemudian dikenal dengan budaya patriarki.

Kajian wanita yang berfokus pada pengalaman wanita beserta masalah-masalah yang dihadapi sudah banyak dilakukan baik yang bersifat interdisipliner maupun yang orientasinya mengarah kepada kegiatan konkrit. Kajian dan evaluasi mengenai kegiatan konkrit wanita dalam organisasi yang bertujuan mewujudkan pemberdayaan dan kemitrasejajaran antara pria dan

wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masih sangat terbuka dan perlu dilakukan secara terus menerus.

Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan wanita yang hasilnya terlihat dari adanya peningkatan peran dan kedudukan wanita diberbagai bidang kehidupan. Berdasarkan Biro Pemberdayaan Wanita Kementerian Peranan Wanita 2007 peningkatan tersebut masih belum sebagaimana diharapkan, yaitu terwujudnya keadilan dan keselarasan antara wanita dan pria dalam hak dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Guna meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) wanita Indonesia dan mewujudkan kemitrasejajaran antara pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah membentuk berbagai program dan sarana yang dapat membantu; salah satunya adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini telah diakui oleh masyarakat, bahkan pada tahun 2007 mendapat penghargaan dari beberapa lembaga internasional (WHO, Unicef, Unesco, dan sebagainya) karena melalui 10 program pokoknya PKK telah mampu melibatkan wanita dan pria dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri.

Menurut sejarahnya, PKK semula merupakan akronim dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi wanita melalui program pendidikan perempuan. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk membina dan membangun

keluarga dibidang mental, spiritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup. Anggotanya adalah tokoh/pemuka masyarakat, para isteri Kepala Dinas/Jawatan dan isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya dengan adanya reformasi serta paradigma baru dan semangat otonomi daerah, sejak tahun 1999 akronim PKK berubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kata pemberdayaan dipilih karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan kualitas wanita melalui program pemberdayaan wanita yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri wanita.

Dari sisi programnya, PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan wanita agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan wanita kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri wanita yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2007). Hal tersebut

diperkuat dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap Deklarasi Milenium yang ditandatangani dalam *United Nations Millenium Summit* di New York Amerika tahun 2000. Tujuan Pembangunan Milenium yang harus dicapai tahun 2015 antara lain adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. PKK menjadi gerakan untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat.

PKK yang merekrut anggota sampai lapisan bawah dengan cara mengajak ibu rumah tangga yang ingin bergabung dan menjadi pengurus Organisasi PKK. Masyarakat diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Melalui PKK diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran agar dapat melaksanakan fungsi dan peran sebagai wanita.

Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan wanita dari belenggu budaya patriarkhi, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan wanita, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Adanya kesenjangan ini menyebabkan perlunya melakukan penelitian terhadap PKK, khususnya di Kampung Endang Rejo.

Kelurahan Endang Rejo merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk 4.711 jiwa, yang terdiri atas 1.478 KK (Kepala Keluarga) dan tersebar di lima dusun. Dari ke lima dusun ini terdapat lima orang yang ditunjuk sebagai penggerak PKK. Organisasi PKK di Kelurahan Endang Rejo ini memiliki peranan dalam meningkatkan pemberdayaan wanita. Dalam melaksanakan kegiatan PKK ini memberikan kontribusi yang positif terhadap wanita sebagai ibu rumah tangga. Melalui PKK, wanita dapat mengaktualisasikan dirinya untuk aktif, selain perannya sebagai ibu rumah tangga. Tingkat keaktifan peranan PPK dalam meningkatkan pemberdayaan wanita yang ada di Kelurahan Endang Rejo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Keterlaksanaan Program Pokok PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita di Kelurahan Endang Rejo

No.	Program PKK	Kegiatan Rutin	Pernah Dilakukan	Tidak Pernah Dilakukan
1.	Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	✓		
2.	Gotong Royong		✓	
3.	Pendidikan Dan Ketrampilan	✓		
4.	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi			✓
5.	Pangan		✓	
6.	Sandang		✓	
7.	Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga		✓	
8.	Kesehatan	✓		
9.	Kelestarian Lingkungan Hidup			✓
10.	Perencanaan Sehat			✓

Sumber: Ketua PKK Kelurahan Endang Rejo, 2014

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ke-10 program kerja PKK belum sepenuhnya mampu berjalan. Salah satu kegiatan yang rutin adalah Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, bentuk kegiatannya berupa pengajian; Pendidikan Dan Ketrampilan, bentuk kegiatannya seperti PAUD; dan Kesehatan, seperti POSYANDU dan penggalakkan program Keluarga Berencana (KB). Program PKK yang lain belum maksimal berjalan, hal ini ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan PKK masih banyak yang belum aktif. Dalam kegiatan tersebut ada hal-hal yang menghambat yaitu waktu dan tenaga, fasilitas, dan pemahaman suami tentang Gerakan PKK. Tetapi untuk program yang sudah berjalan, PKK sudah melakukan kegiatan tersebut dengan

cukup baik. Pada Sumber Daya Manusianya pun sudah cukup baik, sehingga kegiatan yang sudah berjalan dapat menjadi kegiatan rutin.

Berdasarkan wawancara dengan ketua PKK di Kelurahan Endang Rejo, bahwa PKK yang ada saat ini tidak semaju 3 tahun yang lalu. Banyak anggota yang pasif dalam berkontribusi di kelompok PKK ini. Salah satu faktor penyebabnya karena kesibukan mengurus rumah, selain itu masih rendahnya wanita yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program PKK. Program kerja yang saat ini dapat terus berjalan adalah penggalakkan KB (Keluarga Berencana), Posyandu dan PAUD. Program kerja lain seperti dalam bidang pertanian tidak lagi berjalan, karena masih sedikitnya ibu rumah tangga yang bergabung. Sistem rekruitmen kurang mempengaruhi minat ibu rumah tangga untuk ikut PKK, selain itu juga sosialisasi PKK yang masih kurang.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peranan PKK Dalam Meningkatan Pemberdayaan Wanita Di Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Peran PKK kurang berpengaruh dalam upaya pembangunan masyarakat
2. Kaum wanita kurang terlibat dalam pembangunan masyarakat

3. Peranan PKK dalam pemberdayaan wanita kurang maksimal dalam program PKK
4. Sosialisasi PKK yang masih kurang

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: "Peranan PKK Dalam Meningkatan Pemberdayaan Wanita Di Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Peranan PKK Dalam Meningkatan Pemberdayaan Wanita Di Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015?".

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan "Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Di Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015".

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya pembelajaran PPKn dalam kawasan nilai

moral Pancasila, karena melalui PKK dapat membina pengetahuan, keterampilan, watak/karakter masyarakat, khususnya wanita.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan khususnya wanita yang tergabung dalam kelompok PKK.

b. Bagi Wanita

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan untuk mengetahui peranan PKK dalam meningkatkan pemberdayaan wanita, sehingga wanita dapat memanfaatkan PKK sebagai organisasi yang dapat membawa banyak perubahan untuk menciptakan keluarga sejahtera.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan menambah wawasan peneliti dalam melihat keterlibatan wanita dalam PKK.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya PPKn dalam kawasan Pendidikan Nilai Moral Pancasila yang menjelaskan Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Di Kelurahan

Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015.

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah wanita sebagai ibu rumah tangga yang tinggal Di Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

3. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Di Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015.

4. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sejak 23 Desember 2014.